

KREDIBILITAS KOMUNIKATOR POLITIK BASUKI TJAHAYA PURNAMA “AHOK” SEBAGAI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nani Nurani Muksin

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

nanimuksin@gmail.com

Abstrak

Kredibilitas komunikator politik Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, menarik untuk dikaji mengingat beberapa kontroversi yang dilakukan saat menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan gaya komunikasi politik Ahok secara verbal dan non verbal; 2. Menganalisis etika komunikasi politik Ahok; 3. Menjelaskan kredibilitas komunikator politik Ahok. Pendekatan penelitian ini Kualitatif, metode penelitian Deskriptif. Sumber data: mahasiswa MIKOM UMJ. Teknik pengumpulan data dengan FGD. Hasil penelitian: 1) Gaya komunikasi politik Ahok secara verbal berbicara secara cepat dan tegas. Ahok termasuk kategori komunikator politik dengan gaya retorika “noble self” yaitu orang yang tidak mau mendengar pendapat orang lain. Gaya komunikasi Ahok low context. Gaya komunikasi non verbal Ahok meledak-ledak; secara kinesik kerap menunjuk-nunjuk dan menggebrak meja untuk menunjukkan kekesalannya. Secara “eye contact” sering membelalakkan mata “melotot” saat berbicara secara keras. 2) Berdasarkan etika, Komunikasi Politik Ahok sebagai pejabat Gubernur DKI dinilai kurang mengindahkan norma dan aturan sopan santun meski tujuannya baik. 3) Kredibilitas Ahok berdasarkan unsur expertise dinilai mempunyai kemampuan dan cerdas secara politik, trustworthiness dibuktikan dengan program yang berjalan baik, dinilai bersih meski ada kontroversi antara lain kasus RS Sumber Waras dan reklamasi, attractiveness selalu menarik perhatian karena berbeda dari pejabat pada umumnya, selalu mengunggah rapat dinas dan aktivitasnya melalui You Tube, terbuka menerima masyarakat dan komentarnya selalu ditunggu media; power mendapat dukungan dari para pendukung dan relawan yang solid dan dekat dengan penguasa.

Kata Kunci: Ahok, Gubernur, Kredibilitas, Komunikator Politik

ARTICLE TITLE IN ENGLISH (UPPERCASE, 12 pt, bold)

Abstract (font size 12, bold)

Written in English. This section contains a summary of the research consisted of background, research objectives, research methods, research results, and conclusions. Abstract followed by at least four keywords, written sequential alphabet. Abstract written by each length between 200-250 words. It should not contain any references or displayed equations. Abstract is written with Times New Roman font size 10 and single spacing.

Keywords: at least four keywords written sequential alphabetical, Times New Roman 10 pt, italic.

PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan elemen penting dalam sebuah sistem politik, karena melalui komunikasi politik maka antar elemen dalam sebuah sistem politik dapat terhubung. Melalui komunikasi politiklah sebuah sistem politik

dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Komunikasi politik menjadi kunci bagi efektifitas sebuah sistem politik termasuk dalam hal ini adalah sistem politik sebuah pemerintahan daerah.

Urgensi komunikasi politik dalam sebuah pemerintahan daerah kembali mengemuka ketika Basuki Tjahaya Purnama atau sering disapa Ahok menjabat menjadi Wakil Gubernur dan kemudian menjadi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta menggantikan Jokowi yang menjadi Presiden. Hal ini terkait dengan figurinya yang menarik perhatian terutama berkaitan dengan gaya komunikasi politiknya yang kontroversial. Di balik sosok Ahok yang tegas dan berani, beberapa kalangan menilai Ahok kurang memiliki komunikasi politik yang baik. Gaya komunikasi politik Ahok dianggap kurang ideal, padahal gaya komunikasi politik bagi seorang pemimpin daerah merupakan hal yang urgen terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kredibilitas komunikator politik Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi suatu hal yang penting dan menarik untuk dikaji.

Beberapa kebijakan kontroversial antara lain tentang lelang jabatan di kalangan pejabat Pemprov DKI, menaikkan Tunjangan Kepegawaian Daerah (TKD) pegawai Pemprov DKI yang sangat tinggi, memberhentikan pejabat yang kinerjanya dianggap buruk, keluar dari partai pengusungnya, yakni partai Gerindra, karena mewacanakan pemilihan gubernur tidak langsung, menolak usulan APBD tahun 2015 oleh DPR karena diduga ada dana "siluman" di dalamnya hingga trilyunan rupiah, hingga melaporkan anggota DPRD DKI ke Kepolisian dan KPK. Sedangkan gaya komunikasi politiknya yang juga kontroversial antara lain adalah gaya bicaranya yang terus terang bahkan terkadang memarahi pejabat di depan umum. Ahok, juga terkadang berbicara dan menanggapi secara emosional bila ada yang kurang berkenan, atau bahkan menggunakan kosa kata yang kurang santun saat tampil di media. Hal yang paling menarik perhatian publik adalah saat Ahok berkonflik dengan

DPRD DKI Jakarta terkait masalah APBD tahun 2015.

Beberapa pengamat menyarankan agar Ahok memperbaiki komunikasi politiknya terkait dengan pembahasan APBD dengan DPRD DKI. Anggota DPD DKI Jakarta AM Fatwa menilai bahwa deadlock-nya mediasi antara Ahok dan DPRD salah satunya disebabkan tidak terciptanya komunikasi positif antar-ke dua institusi pemerintahan tersebut. "Selama ini sebenarnya komunikasi politik yang rusak antara DPRD dan Gubernur," menurut AM Fatwa dalam dialog Bincang Senator dengan tema 'Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi' di Brewerkz Cafe, Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu, 15 Maret 2015.

AM Fatwa juga berpendapat, sikap emosional mantan Bupati Belitung Timur itu juga menjadi pemicu semakin renggangnya hubungan antara Pemprov Jakarta dan DPRD DKI. "Ahok sendiri juga dia mempunyai kelemahan dalam komunikasi," AM Fatwa menyarankan agar kepada Ahok untuk memperbaiki komunikasi sehingga kisruh pembahasan APBD DKI tidak semakin meruncing (<http://news.liputan6.com/read/2191285/am-fatwa-kisruh-apbd-ahok-punya-kelemahan-dalam-komunikasi>). Sebagai pemimpin daerah, Ahok hendaknya berkomunikasi lebih santun dan dapat menahan diri sehingga dapat memperbaiki keadaan, bukan sebaliknya.

AM Fatwa juga menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok adalah figur yang berani dan bersih, tetapi sebagai penyelenggara negara, etika dan komunikasi politiknya lemah. Menurut AM Fatwa, Ahok kadang-kadang sikapnya emosional dan pernyataannya di ruang publik sering kurang santun. Sebagai kepala daerah yang merupakan penyelenggara negara, Ahok hendaknya dapat meredam sikap emosionalnya serta berbicara lebih hati-hati dan santun di ruang publik. "Ahok adalah figur kepala daerah yang berani melawan DPRD

secara terbuka meskipun anggota DPRD dari beberapa fraksi," begitu yang disampaikan AM Fatwa pada diskusi 'Dialog Kenegaraan: "Ahok vs DPRD DKI: di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2015, (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/03/04/nkokar-am-fatwa-ahok-figur-berani-tapi-etika-politiknya-lemah>). Belum terselesaikannya konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta terkait dengan APBD DKI intinya adalah masalah komunikasi politik.

Pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo. Kisruh antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disebut merupakan masalah komunikasi politik. Ahok dinilai tidak bisa melakukan pendekatan kepada DPRD DKI dengan cara membangun komunikasi yang baik. "Ahok tidak pandai melakukan pendekatan kepada DPRD sebelum pembahasan anggaran. Pendekatan tidak harus menggunakan dana di anggaran, tetapi berkomunikasi dan bergaul dengan baik," kata pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, kepada Kompas.com, Kamis (26/2/2015). Agus menyatakan bahwa gaya komunikasi Ahok serupa dengan seseorang yang ingin mengajak berkelahi. Caranya berbicara pun seperti menantang siapa pun yang dia anggap tidak baik, termasuk dalam hal ini pihak DPRD DKI (megapolitan.kompas.com/read/.../Buruknya.Komunikasi.Politik.Ahok).

Kisruh APBD DKI yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD, dianggap semakin memperlihatkan gaya kepemimpinan Ahok yang kurang ideal. Menurut Peneliti Komunikasi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Nur, dari perkembangan persoalan ini, gaya komunikasi Ahok dari awal dinilai memiliki kecenderungan melanggar rambu-rambu. Menurutny, Ahok memiliki attitude atau

sikap yang tidak tepat dalam meng-handle persoalan APBD DKI. Firman juga mengatakan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan seperti Ahok yang meledak-ledak dan semaunya, di negara-negara demokrasi terbilang cukup jarang. "Leader yang ideal dalam konteks demokrasi ini jadi kabur, plus dalam konteks lokal pada persoalan (Ahok),".

Namun, menurut Firman, gaya komunikasi politik yang baik itu harus dibangun secara baik dan bersama-sama. Pemimpin daerah dan legislatif harus dapat berkoordinasi dan menyelesaikan permasalahan dengan cepat. "Harus disadari pemimpin lokal (eksekutif), dia bukan otoritas tunggal, tetapi butuh partner (legislatif),". Munculnya pemimpin politik dengan gaya komunikasi politik yang baik nantinya akan berbentuk sebuah kesepakatan secara bersama dengan mitra kerja, bukan membentuk jarak antara eksekutif dan legislatif (<http://metro.news.viva.co.id/news/read/601501-pengamat-ahok-langgar-rambu-kepemimpinan>).

Akademisi Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, menyarankan agar Ahok belajar Sosiolinguistik. Model komunikasi politik Ahok, dalam perspektif sosiolinguistik, tergolong aneh dan keluar dari pakem komunikasi politik seorang figur publik. Saat berkomunikasi, Ahok dianggap tidak lagi mewakili model komunikasi adat Timur, yang mengedepankan kesantunan, toleransi, tepo seliro, unggah-ungguh, dan menghindarkan diri dari kata-kata kasar. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kata-kata kasar, bahkan vulgar, meluncur dengan deras dari Ahok seperti " maling, bajingan, bego, brengsek, perampok, dan bandit" (<http://www.uin-malang.ac.id/r/150301/andai-ahok-belajar-sosiolinguistik.html>).

Melalui Sosiolinguistik, diharapkan Ahok mengingat bahwa bahasa tidak saja dipakai untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membangun harmoni sosial.

Melalui bahasa harus tercipta suatu kondisi harmonis yang menjadikan masyarakat penggunanya hidup tentram dan damai, dan bukan sebaliknya. Bahasa itu indah, karena itu diucapkan dengan cara yang bijak. Kondisi harmoni akan semakin indah bila maksud yang baik dan mulia bisa disampaikan dengan cara yang baik, santun, bersahabat, dan saling menghargai.

Salah satu prinsip dasar sosiolinguistik terkait makna adalah makna kata bukan pada kata itu sendiri, tetapi pada siapa yang menggunakannya atau mengucapkannya. Ahok saat ini bukan sembarang siapa. Dia adalah seorang gubernur ibukota negara yang terpilih secara demokratis lewat pilihan langsung. Karena memiliki otoritas yang demikian besar sebagai gubernur, maka ucapannya menjadi keputusannya. Apa yang diucapkan menjadi keputusan politik.

Sementara pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebutkan bahwa karakter dan pola pikir Ahok sulit diubah dalam sekejap. Namun, sikap Ahok seperti bicara ceplas ceplos dan mengumbar amarah di depan umum harus diubah. "Sebagai pemimpin daerah, gubernur dan wakil gubernur harus menunjukkan perilaku positif meneladani, tegas, dan jelas agar masyarakat simpati juga menghormati. Menurut Siti Zuhro, perlu dikurangi mungkin bicara sekenanya, mengumpat, dan ceplas ceplos," (<http://news.detik.com/berita/2517531/karakter-mirip-ali-sadikin-tapi-ahok-diminta-agak-luwes>).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, kredibilitas komunikasi politik Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji secara akademik. Masalah ini juga penting mengingat komunikasi politik seorang pemimpin daerah akan berdampak pada kebijakan yang diambilnya dan akan mempengaruhi publik yang dipimpinnya.

Berdasarkan latar belakang masalah

yang dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan gaya komunikasi politik Ahok secara verbal dan non verbal: 2. Menganalisis etika komunikasi politik Ahok; 3. Menjelaskan kredibilitas komunikator politik Ahok.

Penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penelitian ini antara lain penelitian tentang Preferensi Opini Publik dalam Media Online (Preferensi Opini Publik terhadap Citra Ahok dalam Lipsus Kompas.com tentang Penertiban PKL Pasar Tanah Abang Bulan Juli 2013) oleh Ni Luh Ratih Maha Rani.

Intisari dari penelitian ini adalah: Opini publik merupakan akumulasi dari citra yang tercipta atau diciptakan dalam proses komunikasi. Kompas.com memiliki rubrik khusus untuk mengulas liputan yang berkaitan dengan aktivitas Basuki atau Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI, salah satunya adalah penerbitan PKL Pasar Tanah Abang. Opini yang tercermin dalam komentar pembaca berita itulah yang menjadi objek dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk melihat kecenderungan opini publik terhadap citra Ahok dalam Kompas.com.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi opini publik terhadap citra Ahok dalam kaitannya dengan penertiban PKL Pasar Tanah Abang adalah positif atau mendukung terhadap sosok Ahok (Basuki). Mayoritas pembaca menilai bahwa Ahok merupakan orang yang tegas dan taat terhadap peraturan perundangan. Meskipun kadang ungkapan dan sikapnya mengundang terkesan kontroversi dan keras, namun sosoknya tetap dinilai sebagai pemimpin yang didambakan masyarakat untuk membawa perubahan bagi Jakarta.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi opini publik terhadap citra Ahok terkait dengan penertiban PKL Pasar Tanah Abang antara lain adalah: (1) Faktor psikologis yang berbeda juga mengakibatkan hasil interpretasi dan respon publik terhadap

pemberitaan akan berbeda. (2) Faktor sosiologis politik juga tampak mempengaruhi publik yang berkomentar. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan nilai fanatisme tertentu. (3) Unsur budaya seperti kepercayaan termasuk juga nilai dan sikap, organisasi sosial, tabiat manusia, orientasi kegiatan, serta persepsi orang lain. (4) Institusi media juga mempengaruhi terbentuknya opini publik terhadap citra Ahok ini. Tercermin Kompas.com secara tersurat memnggambarkan bentuk keberpihakannya pada Ahok di dalam setiap pemberitaannya.

Sedangkan teori yang mendukung adalah teori komunikasi politik, komunikator politik, kredibilitas komunikator politik dan gaya komunikasi politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, dengan metode dan jenis penelitian Deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah adalah mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2014. Kriteria peserta FGD adalah mahasiswa peserta mata kuliah komunikasi politik. Agar lebih fokus maka peserta FGD dibatasi 8 mahasiswa yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Mc Nabb (2002:148) yang mengkatagorikan tahapan analisis data penelitian ke dalam 6 (enam) tahapan kegiatan, sebagai berikut: Organize the Data (Pengorganisasian Data), Generate Categories, Themes and Patterns (Penggeneralisasian kategori, tema dan topik penelitian), Code the Data (Pengkodean Data), Apply the Ideas, Theme and Categories (Penerapan Ide, Tema dan Kategorisasi), Search for Alternative Eksplanations (Pencarian Alternatif Penjelasan), Write and

Present the Report (Menulis dan Menyajikan Laporan).

Guna mencapai rigor dalam penelitian ini, maka teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh bagaimana kredibilitas komunikator politik Basuki Tjahaya Purnama “Ahok” sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Adapun tipe triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dalam hal pengumpulan data (data triangulation), yaitu dengan teknik: member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Komunikasi Politik Secara Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata yang mengikuti aturan tata bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media. Contoh komunikasi verbal secara lisan adalah kata-kata yang disampaikan Ahok secara lisan ketika memimpin rapat dengan jajaran SKPD di Pemprov DKI Jakarta, atau ketika bertemu dengan masyarakat yang menjumpainya. Secara verbal lisan, gaya komunikasi politik Ahok adalah berbicara secara cepat. Ahok berbicara cepat dalam menyampaikan ide-ide dan pesan-pesan komunikasi politiknya, juga dalam merespon informasi-informasi penting terkait dengan masalah-masalah pemerintahan dan masyarakat di provinsi DKI Jakarta. Gaya berbicara secara cepat ini menyiratkan ketegasan Ahok sebagai komunikator politik.

Gaya komunikasi Ahok secara verbal tertulis dituangkan dalam peraturan tertulis yang tegas. Sebagai contoh dalam peraturan kepegawaian, bila ada yang tidak disiplin atau terindikasi melanggar maka akan terkena sanksi tertulis sampai pada pemecatan. Contoh lainnya adalah pada kasus Wakil Gubernur

Jarot Saiful Hidayat memberikan surat izin tentang pelaksanaan Pekan Raya Jakarta dan Ahok menyatakan itu bukan wewenang Wakil Gubernur. Ahok dapat membuat sesuatu yang sangat otoriter namun kemudian mampu mengembalikan citra sebagai seorang pemimpin yang tegas. Pada kasus Tanah Abang pun sebagai gubernur, Ahok menunjukkan ketegasannya meski tidak populis.

Gaya komunikasi politik Ahok secara verbal berdasarkan data dan fakta. Apa yang dibicarakan Ahok berdasarkan data yang kuat, sehingga meski terkesan otoriter tetapi Ahok menunjukkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Gaya berbicara dan merespon yang terlalu cepat, membuat Ahok dianggap bukan pendengar yang baik sehingga pembicaraannya menjadi kurang terukur. Ahok dianggap sebagai pemimpin yang tidak mau mendengar dan lebih mementingkan pembicaraannya sendiri. Seperti dikemukakan Desiana, bahwa Ahok adalah kategori komunikator politik dengan gaya retorika “noble self” yaitu orang yang tidak mau mendengar pendapat dari orang lain. Ciri lainnya adalah meskipun tidak mau mendengarkan orang lain namun pesannya tersampaikan dengan utuh. Sedangkan Ahok menyampaikan pesan politiknya sesuai data dengan sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan. Desiana menyatakan ketidaksetujuannya dengan gaya retorika politik “noble self” seperti yang biasa ditunjukkan Ahok, karena budaya di Indonesia tidak terbiasa dengan budaya politik seperti itu (FGD, 23 Januari 2016).

Desiana selanjutnya menyatakan bahwa, selama ini di Indonesia juga di Jakarta sudah terbiasa dengan gaya komunikasi politik yang “high context”. Sedangkan, gaya komunikasi politik Ahok adalah low context karena menyampaikan informasi dan pendapat apa adanya tanpa dikemas secara elegan untuk melindungi perasaan orang lain atau membuat orang lain merasa nyaman. Meski budaya low

context dalam komunikasi politik di Indonesia kurang populer tetapi Ahok dengan pembawaannya yang “to the point” apa adanya, menyampaikan maksud tanpa memframing pesannya dapat membuat lawan bicaranya terkejut dan bahkan tersinggung dengan ucapannya.

Ambo Ilang menyatakan bahwa terdapat tiga gaya komunikasi politik Ahok, yaitu, pertama, timbal balik dan saling mengadakan pembuktiaan. Kedua, yaitu gaya “sok tau” dan terlihat ketika mengatasi banjir. Ketiga, adanya penggabungan antara timbal balik dan dengan gaya ceplas-ceplos dan langsung menyampaikan pesan seperti itu. Selain itu Ahok juga dikenal sebagai pemimpin yang tidak mau diinterupsi (FGD, 23 Januari 2016). Sebagai seorang pemimpin, gaya komunikasi Ahok seperti ini tidak umum, sehingga Ahok muncul sebagai seorang komunikator yang menonjol. Terlebih Ahok menjabat sebagai pemimpin DKI dimana DKI dianggap sebagai representasi pemerintahan di Indonesia. Apa yang dilakukan Ahok selalu disorot media dan menjadi konsumsi publik baik dalam media mainstream maupun media sosial. Hal ini menjadikan Ahok sebagai komunikator yang menonjol dengan gayanya yang unik tersebut.

Sementara itu, Nurdin memberikan pendapatnya terkait gaya komunikasi Ahok secara verbal dan non verbal saat melakukan lelang camat. Menurut Nurdin, gaya komunikasi Ahok saat itu sistemnya seperti “orang bermain main sepak bola”, Ahok akan menilai stafnya ketika terdesak “ngos2an” dan tidak mampu meneruskan tugas, maka akan disiapkan pemain cadangannya. Pada kasus Kartu Jakarta Pintar (KJP), Ahok meneriakkan kata “kau maling, dia maling” kepada seorang ibu yang dianggapnya bersalah karena KJP memang tidak bisa ditarik tunai. Pada kasus tersebut sebenarnya logis karena memang ibu itu berbuat curang. Namun, sebagai seorang pemimpin yang mempunyai kewajiban mengayomi warganya, menenangkan dan

bersikap bijak saat menghadapi kesalahan warganya, maka sikap Ahok ini dianggap tidak tepat, karena dianggap kasar dan tidak menyiratkan seorang pemimpin yang harusnya memberikan tuntunan dan teladan termasuk dalam hal memberikan pernyataan.

Syaiful, menyatakan bahwa apapun gaya komunikasinya Ahok dapat dipercaya. Kondisi ini membuat citra Ahok turun, namun respon publik terhadap gaya komunikasi Ahok cukup bagus, mengingat tidak banyak pemimpin yang selama ini tidak menindaklanjuti tuntutan publik. Tidak banyak pemimpin yang berani membongkar kasus-kasus korupsi. Selama ini pesan yang disampaikan pemimpin disaring, mengingat ada oknum-oknum yang “memainkan” hal tersebut.

Nuraeni menambahkan bahwa peristiwa ada sosok pemimpin yang seperti Ahok ini jarang sekali terjadi. Gaya komunikasi yang kasar, dan cenderung tidak mau “diinterupsi”. Kebanyakan gaya komunikasi seperti itu dihindari terutama oleh para pemimpin (FGD, 23 Januari 2016). Namun, gaya komunikasi ini pun diterapkan Ahok saat memimpin rapat dengan staf Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Sebagaimana yang dapat disaksikan di You Tube, saat memimpin rapat dengan stafnya, Ahok seringkali terlihat marah-marah dan mengambil keputusan frontal misalnya saat memberhentikan kepala dinas dan staf yang dianggap bersalah dan tidak dapat bekerja dengan baik pada saat itu juga. Keputusan mendadak yang diambil tanpa perencanaan matang dan perkiraan akibatnya serta diunggah di media online You Tube dianggap sebagai sikap pemimpin yang kurang bijaksana. Mengingat semua orang dapat menyaksikan hal tersebut dan efek malu, serta nama baik staf yang diturunkan jabatannya tersebut akan terus dapat diingat publik, karena publik dapat memutar ulang tayangan di You Tube kapan saja.

Desiana pun menambahkan bahwa gaya komunikasi Ahok adalah low context, noble self dan tidak ada kesempatan orang lain yang benar. Namun ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa Ahok masih bisa kok diajak musyawarah. Bagaimana masyarakat menilai tergantung dari latar belakang suku bangsa, budaya, dan agama. Meski sebagian besar publik menyatakan ketidaknyamanannya dengan gaya komunikasi politik Ahok. Namun sebagian yang lain merasakan bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang dapat bekerja dan menjalankan program-program, artinya, aksi lebih penting dari bahasa atau perkataan.

Tentang kebudayaan, Engelbaktia menambahkan bahwa karena Ahok adalah minoritas, maka semakin menonjol dan menjadi perhatian publik. Ahok menyatakan dirinya bersih dari sifat KKN terutama korupsi. Ahok memiliki komitmen dan integritas yang tinggi. Basuki Thjahaya Purnama lebih suka dipanggil dengan nama Ahok. Artinya, Ahok mewakili minoritas yang mencoba meyakinkan bahwa minoritas masih bisa hebat dan berintegritas tinggi seperti dirinya.

Komunikasi Non verbal

Gaya komunikasi non verbal adalah gaya komunikasi dengan pesan non verbal yaitu pesan yang disampaikan tidak mengikuti aturan tata bahasa. Pesan non verbal disepakati secara sosial dan budaya. Beberapa bentuk komunikasi non verbal antara lain intonasi, paralinguistik, gesture, ungkapan wajah atau mimik muka (facial), body language, dan ungkapan diam. Gaya komunikasi non verbal meski tidak diatur secara tata bahasa tetapi sangat menentukan makna yang diterima oleh khalayak. Hal ini mengingat, makna komunikasi non verbal tidak ada yang baku dan dapat bermakna banyak sesuai kesepakatan budaya.

Gaya komunikasi non verbal Ahok yang kerap diperlihatkan pada khalayak adalah

gaya komunikasi yang meledak-ledak dengan vokal dan intonasi yang tinggi. Gaya komunikasi yang meledak-ledak dan intonasi tinggi seperti ini dianggap tidak ramah dan tidak menyenangkan, terutama bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama budaya Jawa yang berbudaya ramah dan lembut. Gaya komunikasi politik Ahok yang meledak-ledak dianggap sebagai bentuk emosi kemarahan sehingga, khalayak menganggap hal ini kurang patut ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang dituntut bersikap mengayomi, lebih sabar dan lebih banyak mendengar. Gaya komunikasi politik Ahok dengan intonasi yang tinggi juga dianggap tidak mencerminkan pemimpin yang bijak karena pemimpin harus memberikan contoh yang baik bagi stafnya dan masyarakat.

Gaya komunikasi politik non verbal lainnya yang sering kali ditunjukkan Ahok adalah Kinesik yaitu penggunaan gerakan tubuh. Gaya komunikasi non verbal Ahok secara kinesik antara lain adalah dengan cara menunjuk-nunjuk dan menggebrak-gebrak meja untuk menunjukkan kekesalannya. Hal ini dilakukan misalnya saat pertemuan di Balai Warga, atau saat memimpin rapat dengan stafnya di Balai Kota. Gaya komunikasi non verbal kinesik dengan menggebrak-gebrakan meja dan menunjuk-nunjuk apalagi disertai dengan mata yang terbelalak dan melotot, juga menyiratkan sikap yang kurang santun dan tidak patut diteladani bagi seorang pemimpin, apalagi ditunjukkan di depan khalayak umum.

Seperti disampaikan Nuraini, gaya komunikasi non verbal Ahok sering mengacungkan jari. Gesturnya Ahok banyak menggunakan gerakan tangan namun gerakan tangan yang menyiratkan ketidaksukaan, ketidaksetujuan, kekesalan dan kemarahan (FGD, 23 Januari 2016). Gaya non verbal seperti inipun dianggap tidak populis karena lawan bicara akan merasa tersinggung, dan tidak suka dengan gaya seperti itu.

Gaya komunikasi politik non verbal Ahok lainnya adalah gerakan mata “eye contact” yang sering membelalakan mata

“melotot” saat berbicara secara keras. Gaya non verbal seperti inipun dianggap kurang bijak dilakukan oleh seorang pemimpin yang dituntut bersikap mengayomi dan melindungi warganya.

Etika Komunikasi Politik Ahok

Etika berkaitan mengkaji tentang perilaku manusia. Menurut Bertens, etika adalah norma atau nilai sebagai pegangan seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah laku orang atau kelompok tersebut. Pembahasan etika mencakup bagaimana konsep dan analisis tentang tanggung jawab, benar-salah, serta baik-buruk. Dalam konteks komunikasi politik, etika komunikasi politik merujuk pada nilai atau norma yang digunakan dalam proses komunikasi politik, yakni proses penyampaian pendapat atau aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan politik penguasa.

Seperti dikemukakan Iwan Nefawan (FGD, 23 Januari 2016), Pernyataan Ahok saat memecat stafnya dengan langsung eksekusi “membuat merinding” karena begitu kerasnya. Kemudian gerakannya mengukur kinerja karyawan cukup bagus karena diukur setiap hari. Dan sebagian karyawan meningkat kinerjanya. Namun, komunikasi politiknya dengan DPRD menjadi kontraproduktif, dari 17 Raperda hanya 2 yang dihasilkan pasca konflik. Ini gejala keengganan dari DPRD menyesuaikan dengan gaya komunikasi politik Ahok.

Masalah etika juga mempermasalahkan persoalan apakah tujuan yang baik bisa dicapai dengan cara yang tidak baik. Seperti misalnya berperangai kasar dan tampak buruk dengan dalih untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Engel peserta FGD berpendapat: “kalau kembali dengan tujuan, etika harus tak harus diindahkan jika tujuannya baik. Ahok sadar dia berbeda dgn Jokowi yang lembut. Masyarakat senang dibuai, namun Ahok tidak mau kompromi” (FGD, 23 Januari 2016).

Etika adalah penilaian baik dan buruk. Tujuannya baik seharusnya dilakukan dengan cara yang baik juga. Desiana, ini masalah implikasi, artinya selalu akan ada penialian yang tidak baik jika menyangkut kebiasaan yang sudah lama terbangun. Aristoteles, the golden mind, seorang pemimpin akan mengelola pemerintahan, maka ketika dia menggunakan etika yang baik maka akan berefek baik juga. Ahok menjalankan apa yang harusnya seperti itu.

Kredibilitas Ahok sebagai Komunikator Politik

Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikate tentang sifat-sifat komunikator. Kredibilitas adalah persepsi komunikate yang tidak inheren dalam diri komunikator. Kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator. Kredibilitas berkaitan dengan masalah persepsi, karenanya kredibilitas berubah bergantung pada pelaku persepsi (komunikate), topik yang dibahas, dan situasi (Rakhmat, 2008:257).

Komponen kredibilitas yang paling penting adalah keahlian dan kepercayaan. Keahlian adalah penilaian komunikasi mengenai kemampuan, kecerdasan, pengalaman seorang komunikator. Komunikator yang dianggap mempunyai keahlian yang tinggi biasanya akan lebih dihargai. Kepercayaan adalah kesan komunikasi tentang watak komunikator. Komunikasi biasanya akan menilai apakah komunikator itu mempunyai sifat jujur, tulus, sopan dan etis (Rakhmat, 2008:260).

Kita dapat menilai kredibilitas Ahok sebagai komunikator politik dengan melihat keahliannya. Menurut Iwan, berkaitan dengan keahlian, kredibilitasnya sudah baik. Publik menilai karena keahlian Ahok menata birokrasi maka mengurus perizinan dan lain-lain menjadi mudah. Sementara Syaiful, memandang dari sudut media, Ahok dan timnya pandai mengelola media sehingga

menjadi “media darling”. Media ini selalu memuat apapun yang Ahok katakan.

Ahok sebagai media darling dianggap sebagai sebuah keahlian sehingga media selalu memberikannya “panggung” yang membuatnya terus dikenal di masyarakat. Menurut Engel, kredibilitas Ahok itu hebat dan bisa memainkan peran kunci. Seperti pada kasus KPK dan BPK tentang RS Sumber Waras, Ahok berani menantang BPK. Ketika ada pemberitaan “menggebrak” meja, hal itu yang sangat membangun citra Ahok di media. Sementara Ambo, melihat kekuatan Ahok adalah pendukungnya tidak berafiliasi oleh partai. Meskipun dia independen dia tetap hebat (FGD, 23 Januari 2016).

Unsur kredibilitas yang berikutnya adalah kepercayaan atau trustworthiness yaitu sejauh mana Ahok sebagai komunikator politik dapat dipercaya oleh orang lain. Menurut Syaiful, berkaitan dengan kasus Sumber Waras, masyarakat menunggu apakah Ahok bersalah atau tidak.

Attractiveness atau daya tarik merupakan komponen berikut dalam menilai kredibilitas komunikator politik. Ahok sebagai komunikator politik dianggap sangat terlihat attractiveness-nya. Menurut Syaiful, attractiveness Ahok sudah sangat jelas. Menurut Engel, Ahok dapat menciptakan daya tarik misal dengan kasus tentang rumah kos, yang lebih dari 10 harus kena pajak. Gereja dibongkar karena tidak ada izin bangunnya. Hal tersebut menjadi berita, Ahok atraktif karena memanfaatkan moment.

Komponen terakhir dalam kredibilitas komunikator politik adalah power atau kekuasaan. Ahok dianggap sebagai seseorang yang memiliki power dan dapat memanfaatkan power atau kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Syaiful, Ahok pandai membaca peluang dan memainkan power dengan memainkan anggaran. Seperti guru-guru madrasah yang diberikan umrah, itu terobosan yang berani.

SIMPULAN

Gaya komunikasi politik Ahok secara verbal berbicara secara cepat dalam menyampaikan ide-ide dan pesan-pesan komunikasi politiknya. Ahok adalah kategori komunikator politik dengan gaya retorika “noble self” yaitu orang yang tidak mau mendengar pendapat dari orang lain, namun pesannya tersampaikan dengan utuh. Gaya komunikasi Ahok adalah low context.

Gaya komunikasi politik Ahok secara non verbal, meledak-ledak dengan vokal dan intonasi yang tinggi. Gaya komunikasi non verbal Ahok secara kinesik antara lain ditunjukkan dengan cara menunjuk-nunjuk dan menggebrak-gebrak meja untuk menunjukkan kekesalannya. Gaya komunikasi politik non verbal Ahok lainnya adalah gerakan mata “eye contact” yang sering membelalakkan mata “melotot” saat berbicara secara keras.

Etika Komunikasi Politik Ahok Sebagai Gubernur Pemprov DKI Jakarta. Komunikasi politik Ahok terlihat kurang beretika dengan tidak mengindahkan norma dan sopan santun tetapi di sisi lain tujuannya baik dan memang Ahok selalu bertindak berorientasi pada tujuan meskipun tampak melanggar atau kurang memperhatikan etika.

Kredibilitas Ahok berdasarkan unsur expertise dinilai mempunyai kemampuan dan cerdas secara politik; trustworthiness dibuktikan dengan program yang berjalan baik, dinilai bersih meski ada kontroversi antara lain kasus RS Sumber Waras; attractiveness selalu menarik perhatian karena berbeda dari pejabat pada umumnya, selalu mengunggah rapat dinas dan aktivitasnya melalui Youtube, terbuka menerima masyarakat dan komentarnya selalu ditunggu media; power mendapat dukungan dari para pendukung dan relawan yang solid dan dekat dengan penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Littlejohn, Stephen W dan Foss, Karen A. 2009. *Theories of Human Communication*, 9th ed. - *Teori Komunikasi*. Penerjemah: Muhammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Lynda Lee Kaid, *Handbook of Political Communication Research* (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004).

McNabb, David. 2002. *Research Methods in Public Administration & Nonprofit Management: Quantitative & Qualitative Approaches*. M.E. Sharpe.

Nimmo, Dan. (1989). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media* (Edisi Terjemahan oleh Tjun Surjaman). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Richard M. Perloff, *Political Communication: Politic, Press and Public in America* (New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1998).

Lain-lain:

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/601501-pengamat--ahok-langgar-rambu-kepemimpinan>

<http://news.detik.com/berita/2517531/karakter-mirip-ali-sadikin-tapi-ahok-diminta-agak-luwes>

<http://news.liputan6.com/read/2191285/am-fatwa-kisruh-apbd-ahok-punya-kelemahan-dalam-komunikasi>

<http://www.uin-malang.ac.id/r/150301/andai-ahok-belajar-sosiolinguistik.html>

<http://megapolitan.kompas.com/read/.../Buruknya.Komunikasi.Politik.Ahok>